



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



Strategi penguatan implementasi perencanaan berbasis data (PBD) untuk peningkatan mutu layanan pendidikan

Edi Firzada^{*)}

Perencana Ahli Muda, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 27th, 2026

Revised Sep 23th, 2026

Accepted Okt 01th, 2026

Keyword:

PBD,
Rapor pendidikan,
Mutu layanan pendidikan,
Kota Sungai Penuh

ABSTRACT

Masih terdapatnya nilai rendah/merah di Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh dalam tiga tahun terakhir menjadi masalah serius yang harus diatasi guna meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh. Policy paper ini bertujuan merumuskan strategi penguatan implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) melalui pendekatan analisis kebijakan dengan metode USG (urgency, seriousness, growth), analisis SWOT, serta analisis kelayakan berdasarkan kriteria William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada pemanfaatan data Rapor Pendidikan yang belum optimal. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran menjadi pilihan paling prioritas. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui tahapan IRB, yaitu Identifikasi, Refleksi, dan Benahi. Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan capaian indikator prioritas Rapor Pendidikan sehingga pada akhirnya meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh. Kebaruan policy paper ini terletak pada pengintegrasian analisis USG, SWOT, dan kriteria Dunn untuk merumuskan strategi penguatan PBD pada level pemerintah daerah yang melibatkan aktor lintas kewenangan, berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satuan pendidikan.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Edi Firzada,
Perencana Ahli Muda, Pemerintah Kota Sungai Penuh,
Email: edifirzada@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu urusan strategis dalam pembangunan daerah. Kualitas pendidikan berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, daya saing daerah, serta keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan.

Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah. Untuk memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi layanan pendidikan, capaian peserta didik, akses pendidikan, serta berbagai faktor yang memengaruhi mutu pembelajaran. Kebijakan pendidikan daerah harus disusun berdasarkan kondisi faktual dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen penting dalam menggambarkan kondisi pendidikan adalah Rapor Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengatur Evaluasi Sistem Pendidikan yang mengamankan penggunaan Profil dan Rapor Pendidikan sebagai basis data utama untuk evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan. Rapor Pendidikan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk melihat kondisi mutu layanan pendidikan secara lebih objektif dan menentukan prioritas intervensi berdasarkan data. Rapor Pendidikan menyediakan informasi mengenai berbagai indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas perbaikan, serta merancang intervensi. Namun, keberadaan data belum otomatis menghasilkan kebijakan yang tepat. Tantangan utama terletak pada kemampuan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam membaca, menganalisis, merefleksikan, dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, masih terdapat sejumlah indikator prioritas yang masih rendah dan memerlukan perhatian dan intervensi berkelanjutan. Seperti yang tergambar pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Indikator Prioritas Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh yang rendah dan kurang dalam Tiga Tahun Terakhir

Indikator Prioritas	Kategori 2024	Kategori 2025	Kategori 2026	Kewenangan Pengelola
Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Rendah	Rendah	Rendah	Kota
Angka Partisipasi Sekolah usia 7–18 (kesetaraan)	Rendah	Rendah	Rendah	Kota
Literasi & Numerasi murid SD Kemenag	Rendah	Rendah	Rendah	Kementerian Agama

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Rapor Pendidikan Indonesia Kota Sungai Penuh Tahun 2024, 2005, dan 2026.

Data Tabel 1 menggambarkan bahwa kondisi rapor pendidikan Kota Sungai Penuh dalam tiga tahun terakhir ini masih terdapat indikator prioritas yang rendah dan kurang terutama pada tiga indikator yakni; Persentase PAUD terakreditasi minimal B, Angka Partisipasi Sekolah usia 7–18 (kesetaraan), Literasi & Numerasi murid SD Kemenag. Walaupun pada indikator ini terdapat kewenangan pengelolaan oleh Kementrian Agama, namun capaiannya sangat berpengaruh terhadap Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh. Apabila kondisi ini tidak direspon melalui perencanaan yang terarah, indikator-indikator tersebut berpotensi tetap tertinggal meski capaian Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh secara keseluruhan menunjukkan tren perbaikan di setiap tahunnya.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah rapor merah ini adalah dengan penguatan implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD). Perencanaan Berbasis Data (PBD) merupakan proses perencanaan yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menyusun program, serta menetapkan kebijakan dan penganggaran yang tepat sasaran. Dalam konteks pendidikan, PBD mendorong pemerintah daerah merencanakan program berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata yang ditunjukkan oleh data, salah satunya melalui Rapor Pendidikan. Penerapan PBD memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan permasalahan nyata yang tercermin dalam Rapor Pendidikan. PBD menjadi instrumen penting dalam mendorong perencanaan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan Pendidikan.

Namun, pada pelaksanaannya implementasi PBD di Kota Sungai Penuh menghadapi berbagai tantangan, seperti; pemanfaatan data rapor pendidikan belum optimal, PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat, koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah, kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas. Kondisi-kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, apabila tidak segera diatasi maka akan menghambat implementasi perencanaan Berbasis Data (PBD) di Kota Sungai Penuh, sehingga nilai merah rapor pendidikan akan sulit ditingkatkan, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap mutu layanan Pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan data merupakan prasyarat penting bagi perbaikan mutu pendidikan. Schildkamp (2019) menegaskan bahwa pengambilan keputusan berbasis data merupakan proses siklik yang meliputi penetapan tujuan, pengumpulan dan interpretasi data, tindakan perbaikan, serta evaluasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada literasi data serta kepemimpinan. Faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan data juga telah diidentifikasi, antara lain karakteristik data, kapasitas individu, serta kondisi organisasi (Hoogland et al., 2016; Schildkamp et al., 2017). Kajian internasional lainnya menunjukkan bahwa kapasitas dan keyakinan pendidik terhadap data sangat menentukan apakah data benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan (Datnow & Hubbard, 2016).

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai PBD dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan masih didominasi oleh kajian pada level satuan pendidikan. Andini et al. (2025) menemukan bahwa Rapor Pendidikan menyediakan data yang akurat dan terkini untuk penyusunan RKAS, tetapi pemangku kepentingan masih memiliki keterbatasan pemahaman dan kemampuan analisis data. Handayani et al. (2025) dan Astuti et al. (2025) menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan siklus identifikasi, refleksi, dan benahi, namun masih menghadapi kendala literasi data, keterbatasan anggaran, dan waktu. Astutiningtyas et al. (2024) menemukan bahwa hasil identifikasi Rapor Pendidikan belum terintegrasi secara efektif ke dalam rencana anggaran sekolah, sedangkan Al Haddar et al. (2026) menegaskan perlunya intervensi yang terarah untuk menindaklanjuti indikator yang capaiannya masih rendah. Pada level daerah, Setiyono et al. (2026) menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan dapat mendukung alokasi anggaran yang lebih efektif dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian, yaitu masih terbatasnya kajian yang menganalisis implementasi PBD pada level pemerintah daerah secara sistematis, mulai dari penentuan prioritas masalah, perumusan alternatif kebijakan, hingga uji kelayakan kebijakan, khususnya pada daerah yang indikator Rapor Pendidikan berada pada kategori rendah selama beberapa tahun berturut-turut. Kebaruan policy paper ini terletak pada pengintegrasian metode USG, analisis SWOT, dan kriteria kelayakan William N. Dunn untuk merumuskan strategi penguatan PBD yang melibatkan pemangku kepentingan lintas kewenangan (pemerintah kota, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan), serta menghasilkan peta jalan implementasi berbasis siklus Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) yang terhubung langsung dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan implementasi PBD di Kota Sungai Penuh; (2) merumuskan dan menilai kelayakan alternatif kebijakan penguatan implementasi PBD; serta (3) menyusun rekomendasi dan langkah implementasi kebijakan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh.

Metode

Penelitian ini merupakan kajian kebijakan (policy paper) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung kuantifikasi sederhana melalui pembobotan skor. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) identifikasi dan penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG; (2) perumusan alternatif kebijakan menggunakan analisis SWOT; dan (3) penilaian kelayakan alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh tahun 2024–2026 serta dokumen regulasi terkait, dan data primer yang diperoleh melalui formulir penilaian USG dan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci.

Identifikasi permasalahan terkait implementasi PBD di Kota Sungai Penuh dilakukan dengan menggunakan metode USG (urgency, seriousness, growth). Metode ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan publik yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah secara sistematis berdasarkan tingkat urgensi, tingkat dampak, serta potensi perkembangan masalah di masa depan (Bryson, 2004). Metode USG banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik dan manajemen strategis sektor publik untuk menilai tingkat kepentingan suatu permasalahan secara sistematis dan terukur. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Kota Sungai Penuh, karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis suatu masalah dalam kerangka pengambilan keputusan kebijakan. Dengan menggunakan metode USG, permasalahan tidak hanya diidentifikasi secara deskriptif, tetapi juga dianalisis berdasarkan tingkat prioritasnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, urgency menunjukkan tingkat kebutuhan untuk segera menangani permasalahan rendahnya capaian rapor pendidikan, mengingat tren nilai rapor pendidikan yang selalu rendah atau berada di rapor merah dalam tiga tahun terakhir. Seriousness menggambarkan besarnya dampak yang ditimbulkan apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi akan mempengaruhi kualitas dan mutu layanan pendidikan. Sementara itu, growth menunjukkan potensi perkembangan masalah menjadi semakin kompleks, luas, dan sulit dikendalikan apabila tidak dilakukan intervensi kebijakan secara tepat dan konsisten. Dalam konteks Kota Sungai Penuh, ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga menjadikan permasalahan rendahnya nilai rapor pendidikan sebagai isu yang tidak hanya mendesak untuk ditangani, tetapi juga memiliki dampak yang serius serta potensi eskalasi yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan metode USG dalam analisis ini diharapkan mampu memberikan dasar argumentasi yang kuat dalam menentukan prioritas kebijakan serta merumuskan strategi perencanaan pendidikan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam mengidentifikasi permasalahan utama, metode USG (urgency, seriousness, growth) dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk menemukan akar permasalahan secara komprehensif. Pendekatan ini didasarkan

pada hasil pengumpulan data, baik melalui pendapat maupun wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui metode USG, permasalahan utama dapat diidentifikasi secara lebih terstruktur dengan menilai berbagai sumber permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya berdasarkan tingkat urgensi, tingkat keseriusan dampak, serta potensi perkembangan masalah di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi PBD di Kota Sungai Penuh sebagai berikut: 1) Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal; 2) PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; 3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat; 4) Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah; dan 5) Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas.

Untuk menentukan prioritas permasalahan sebagai dasar dalam menetapkan masalah utama yang akan ditangani, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Dalam konteks ini, penulis melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam Implementasi PBD di Kota Sungai Penuh. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam, objektif, serta berbasis pada kondisi empiris di lapangan, sehingga proses identifikasi dan penentuan prioritas masalah dapat dilakukan secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Adapun narasumber yang dilibatkan dalam proses ini terdiri dari beberapa perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan Implementasi PBD ini, yaitu: 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Sungai Penuh; 2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal pada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh; 3) Kementerian Agama Kota Sungai Penuh; serta 4) Kepala Sekolah SD Kota Sungai Penuh.

Narasumber dipilih secara purposif (*purposive sampling*) dengan kriteria: (a) memiliki kewenangan atau keterlibatan langsung dalam perencanaan, penganggaran, maupun tindak lanjut Rapor Pendidikan; (b) mewakili unsur pemerintah kota, instansi vertikal (Kementerian Agama), dan satuan pendidikan; serta (c) memahami kondisi capaian Rapor Pendidikan Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah empat orang yang merepresentasikan unsur perencanaan daerah, pengelola layanan pendidikan, pengelola pendidikan keagamaan, dan pelaksana di tingkat satuan pendidikan. Melalui wawancara dan diskusi dengan para narasumber tersebut, diharapkan diperoleh informasi yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD), sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas masalah serta merumuskan strategi kebijakan yang tepat dan efektif.

Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur terhadap keempat responden yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan keseimbangan antara kerangka pertanyaan yang terarah dengan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam. Dalam proses ini, dilakukan pembobotan untuk menilai tingkat urgency, seriousness, dan growth terhadap kelima sumber permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil pembobotan tersebut menjadi dasar analisis dalam menentukan prioritas masalah serta merumuskan problem statement dalam makalah kebijakan ini.

Pelaksanaan wawancara semi-terstruktur dilakukan dalam dua tahapan. Pada tahap pertama, responden diminta untuk mengisi formulir penilaian USG secara mandiri tanpa intervensi, tanya jawab, maupun diskusi, sehingga diperoleh penilaian awal yang objektif berdasarkan persepsi masing-masing responden. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan diskusi mendalam untuk menggali alasan, pertimbangan, serta penjelasan atas penilaian yang telah diberikan, termasuk perbandingan tingkat USG antar permasalahan. Dalam sesi diskusi ini, responden juga diberikan kesempatan untuk merevisi penilaian awalnya apabila ditemukan pertimbangan baru. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menghasilkan kuantifikasi data kualitatif, tetapi juga meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penilaian melalui proses klarifikasi dan refleksi bersama.

Penilaian USG menggunakan skala 1–5 untuk setiap dimensi, yaitu 5 = sangat mendesak/sangat serius/menjadi sangat kompleks; 4 = penting/serius/kompleks; 3 = biasa; 2 = tidak mendesak/tidak serius/tidak begitu kompleks; dan 1 = sangat tidak mendesak/sangat tidak serius/sangat tidak kompleks. Skor total setiap sumber masalah pada masing-masing narasumber dihitung dengan menjumlahkan nilai ketiga dimensi ($U + S + G$) sehingga berada pada rentang 3–15. Selanjutnya, skor dari keempat narasumber diakumulaskan untuk setiap dimensi dan setiap sumber masalah (rentang total 12–60), kemudian diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah untuk menetapkan prioritas masalah. Sumber masalah dengan total nilai tertinggi ditetapkan sebagai masalah utama, sedangkan sumber masalah lainnya diposisikan sebagai penyebab masalah dalam pohon permasalahan. Pada tahap analisis kelayakan, narasumber yang sama memberikan penilaian dengan skala 1–10 terhadap enam kriteria Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) untuk setiap alternatif kebijakan. Nilai rata-rata per kriteria dan per alternatif

digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling layak. Data kualitatif hasil diskusi dianalisis secara tematik untuk memperkuat interpretasi skor yang diberikan oleh narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Responden 1 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Sungai Penuh.

Tabel 2. Hasil Wawancara Responden 1

Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal	5	5	4	14
PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	5	4	4	13
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat	4	4	3	11
Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah	4	4	4	12
Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas	4	3	3	10

Sumber: Hasil Wawancara

Bobot Nilai:

- 5 = Sangat Mendesak/Sangat Serius/Menjadi Sangat kompleks
- 4 = Penting/Serius/Kompleks
- 3 = Biasa
- 2 = Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Begitu Kompleks
- 1 = Sangat Tidak Mendesak/Sangat Tidak Serius/Sangat Tidak Kompleks.

Hasil wawancara Responden 1 menunjukkan bahwa Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal memperoleh nilai tertinggi, yaitu 14, dengan skor maksimal pada aspek *urgency* dan *seriousness*. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data Rapor Pendidikan merupakan masalah yang dianggap paling mendesak dan paling serius. Data Rapor Pendidikan seharusnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas intervensi, menyusun program, serta mengalokasikan sumber daya. Apabila data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka proses perencanaan berisiko tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang teridentifikasi. PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 13, hal ini menunjukkan bahwa masalah PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran dipandang sangat serius, meskipun data telah tersedia, manfaatnya belum maksimal apabila tidak masuk ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Pembentukan rapor Pendidikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, Kementerian Agama, serta pemangku kepentingan lainnya, hal ini ditandai dengan nilai capaian 12. Permasalahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat dengan nilai 11. Sementara itu, Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas memperoleh nilai 10. Responden 2 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal pada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

Tabel 3. Hasil Wawancara Responden 2

Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal	5	5	4	14
PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	5	5	4	14
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat	4	4	4	12
Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah	5	4	4	13
Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas	4	4	3	11

Sumber: Hasil Wawancara

Bobot Nilai:

- 5 = Sangat Mendesak/Sangat Serius/Menjadi Sangat kompleks
- 4 = Penting/Serius/Kompleks
- 3 = Biasa
- 2 = Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Begitu Kompleks
- 1 = Sangat Tidak Mendesak/Sangat Tidak Serius/Sangat Tidak Kompleks.

Hasil wawancara Responden 2 menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi PBD di Kota Sungai Penuh adalah Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal dan PBD belum terintegrasi dalam

perencanaan dan penganggaran sama-sama memperoleh nilai tertinggi sebesar 14. Artinya rendahnya capaian rapor Pendidikan dipengaruhi oleh kedua faktor ini. Selanjutnya, Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah menempati urutan kedua dengan nilai 13, diikuti oleh Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat memperoleh nilai 12. Sementara itu, Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas berada pada urutan terakhir dengan nilai 11. Responden 3: Kementerian Agama Kota Sungai Penuh

Tabel 4. Hasil Wawancara Responden 3

Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal	5	5	4	14
PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	5	4	4	13
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat	4	4	3	11
Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah	5	4	4	13
Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas	4	3	3	10

Sumber: Hasil Wawancara

Bobot Nilai:

5 = Sangat Mendesak/Sangat Serius/Menjadi Sangat kompleks

4 = Penting/Serius/Kompleks

3 = Biasa

2 = Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Begitu Kompleks

1 = Sangat Tidak Mendesak/Sangat Tidak Serius/Sangat Tidak Kompleks.

Hasil wawancara Responden 3 menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi PBD di Kota Sungai Penuh adalah Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal, dengan total nilai tertinggi sebesar 14. Selanjutnya, PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran dan Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah memperoleh nilai sama 13. Sementara itu, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat memperoleh nilai 11. Adapun Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas memperoleh nilai terendah, yaitu 10. Responden 4 Kepala Sekolah SD Kota Sungai Penuh

Tabel 5. Hasil Wawancara Responden 4

Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal	5	5	5	15
PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	5	5	4	14
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat	5	4	4	13
Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah	5	4	4	13
Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas	4	4	4	12

Sumber: Hasil Wawancara

Bobot Nilai:

5 = Sangat Mendesak/Sangat Serius/Menjadi Sangat kompleks

4 = Penting/Serius/Kompleks

3 = Biasa

2 = Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Begitu Kompleks

1 = Sangat Tidak Mendesak/Sangat Tidak Serius/Sangat Tidak Kompleks.

Hasil wawancara Responden 4 menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi PBD di Kota Sungai Penuh adalah Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal dengan total nilai 15. Selanjutnya, permasalahan PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 14, Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah dan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat memperoleh nilai sama 13. Sedangkan Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas memperoleh nilai paling rendah yaitu 12. Berdasarkan hasil penilaian USG oleh keempat responden dengan peran menganalisis permasalahan implementasi PBD di Kota Sungai Penuh, total nilai USG dapat di akumulasi untuk menemukan permasalahan utama dengan nilai USG paling tinggi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian USG oleh Empat Responden

Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai	Prioritas Masalah
Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal	20	20	17	57	I
PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran	20	18	16	54	II
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat	17	16	14	47	IV

Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai	Prioritas Masalah
Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah	19	16	16	51	III
Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas	16	14	13	43	V

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penilaian USG oleh empat responden, permasalahan utama permasalahan implemetasi PBD di kota Sungai Penuh adalah Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal, dengan total nilai tertinggi sebesar 57 dan menempati prioritas pertama. Hal ini menunjukkan bahwa aspek Pemanfaatan data Rapor Pendidikan menjadi isu paling mendesak, serius, dan berpotensi berkembang apabila tidak segera ditangani. Nilai Urgency 20 dan Seriousness 20 merupakan nilai tertinggi pada kedua aspek tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data Rapor Pendidikan dipandang sangat mendesak dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas perencanaan pembangunan pendidikan. Sementara itu, nilai Growth 17 menunjukkan bahwa apabila tidak segera diperbaiki, persoalan ini berpotensi terus memengaruhi proses perencanaan dan peningkatan mutu pendidikan.

PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran dengan total nilai 54 menempati prioritas kedua. Masalah ini sangat berkaitan dengan prioritas I. Rapor Pendidikan yang sudah dianalisis tidak akan memberikan dampak optimal apabila hasil analisisnya tidak diterjemahkan ke dalam program → kegiatan → indikator kinerja → target → anggaran. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara informasi yang dihasilkan oleh Rapor Pendidikan dengan keputusan perencanaan dan penganggaran daerah. Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah menempati prioritas ketiga dengan nilai 51, pembenahan capaian rapor pendidikan tidak hanya membutuhkan peran Dinas Pendidikan, tetapi juga koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain sesuai kewenangan masing-masing seperti kemenag, bappeda, dan satuan pendidikan. Rendahnya koordinasi lintas sektor dapat menyebabkan data dan informasi tidak terintegrasi serta program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak tidak saling mendukung.

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat memperoleh nilai 47 berada pada prioritas IV. Meskipun berada pada prioritas IV, masalah ini tetap penting karena tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, pemerintah daerah akan sulit mengetahui apakah intervensi yang dilakukan benar-benar memperbaiki indikator Rapor Pendidikan. Terakhir, Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas berada pada prioritas V dengan nilai 43. Walaupun menjadi prioritas V, kapasitas SDM tetap merupakan faktor penting karena dalam pembenahan rapor pendidikan membutuhkan kemampuan untuk membaca data, menganalisis akar masalah, menentukan intervensi, menyusun program, serta menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa Pemanfaatan data Rapor Pendidikan yang belum optimal menjadi fokus utama dalam implemetasi PBD di Kota Sungai Penuh.

Konsistensi temuan antarresponden memperkuat penetapan prioritas tersebut. Keempat responden yang mewakili unsur perencana daerah, dinas pendidikan, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan sama-sama menempatkan pemanfaatan data Rapor Pendidikan yang belum optimal pada skor tertinggi (14–15), sedangkan kapasitas SDM secara konsisten berada pada skor terendah. Variasi penilaian hanya muncul pada peringkat menengah, terutama koordinasi lintas sektor yang dinilai lebih tinggi oleh responden dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan dibandingkan responden dari Bappeda. Hal ini mengindikasikan bahwa aktor yang berhadapan langsung dengan indikator berkewenangan kolaboratif lebih merasakan dampak lemahnya koordinasi.

Temuan bahwa pemanfaatan data menjadi masalah yang lebih mendesak dibandingkan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat dijelaskan melalui posisi data dalam siklus pengambilan keputusan. Dalam kerangka *data-based decision making*, data merupakan titik awal yang menentukan kualitas seluruh tahapan berikutnya, mulai dari perumusan tujuan, interpretasi, hingga tindakan perbaikan (Schildkamp, 2019). Tanpa pemanfaatan data yang memadai, koordinasi lintas sektor tidak memiliki dasar bersama untuk menetapkan prioritas, sehingga lemahnya koordinasi lebih tepat dipandang sebagai konsekuensi daripada penyebab utama. Temuan ini sejalan dengan Andini et al. (2025) serta Handayani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa ketersediaan Rapor Pendidikan belum otomatis diikuti kemampuan pemangku kepentingan untuk menganalisis dan menerjemahkannya menjadi program. Kesenjangan antara ketersediaan data dan penggunaannya dalam kebijakan juga merupakan gejala umum dalam *evidence-based policymaking*, karena keputusan publik turut dipengaruhi oleh prioritas politik, kebiasaan perencanaan, dan keterbatasan sumber daya (Cairney & Oliver, 2017).

Prioritas kedua, yakni PBD yang belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, dikonfirmasi oleh penelitian Astutiningtyas et al. (2024) yang menemukan bahwa hasil identifikasi Rapor Pendidikan belum

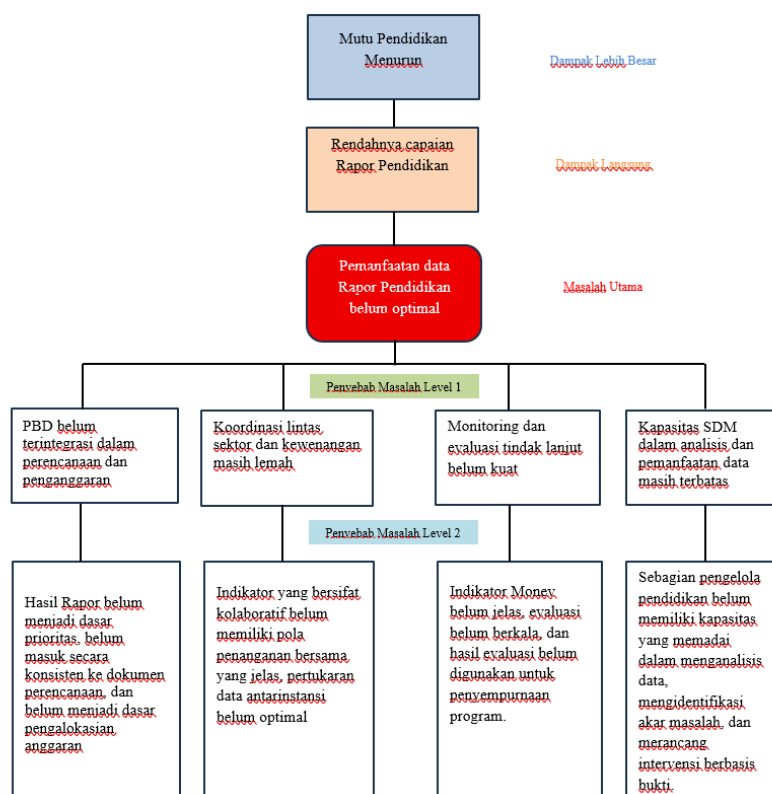
terintegrasi secara efektif ke dalam rencana anggaran. Pada level daerah, Setiyono et al. (2026) menegaskan bahwa perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, meskipun kapasitas SDM menempati prioritas terakhir, literatur menunjukkan bahwa literasi data pendidik dan aparatur merupakan prasyarat keberhasilan pemanfaatan data (Mandinach & Gummer, 2016; Kippers et al., 2018). Peningkatan kapasitas tersebut terbukti lebih efektif apabila dilakukan melalui pendampingan, tim data, dan dukungan kepemimpinan (Marsh & Farrell, 2015; Schildkamp et al., 2019; Ansyari et al., 2020). Dengan demikian, rendahnya peringkat kapasitas SDM dalam penelitian ini lebih mencerminkan persepsi narasumber bahwa persoalan kelembagaan bersifat lebih mendesak, bukan berarti kapasitas SDM dapat diabaikan.

Secara praktis, urutan prioritas tersebut memberikan implikasi bagi kebijakan pendidikan di Kota Sungai Penuh. Prioritas I dan II menuntut agar hasil analisis Rapor Pendidikan menjadi dasar wajib dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan RKPD serta penetapan alokasi anggaran. Prioritas III mengharuskan adanya mekanisme koordinasi formal antara Pemerintah Kota dan Kementerian Agama untuk indikator berkewenangan kolaboratif, seperti literasi dan numerasi murid SD Kemenag. Prioritas IV menuntut sistem monitoring dan evaluasi berkala agar efektivitas intervensi dapat diukur dari tahun ke tahun, sedangkan prioritas V menjadi dasar bagi program peningkatan literasi data aparatur dan pendidik secara berkelanjutan.

Masalah Utama, Pohon Permasalahan, dan Pernyataan Masalah

Urutan masalah pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Pemanfaatan data Rapor Pendidikan belum optimal menjadi masalah utama dalam permasalahan implemetasi PBD di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan analisis analisis terhadap hasil wawancara dengan keempat responden, penyebab masalah level satu dan dua dapat diidentifikasi sebagai berikut: Penyebab Masalah Level 1: 1) PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; 2) Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah; 3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat; dan 4) Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas. Penyebab Masalah Level 2: 1) Hasil Rapor belum menjadi dasar prioritas, belum masuk secara konsisten ke dokumen perencanaan, dan belum menjadi dasar pengalokasian anggaran; 2) Indikator Monev belum jelas, evaluasi belum berkala, dan hasil evaluasi belum digunakan untuk penyempurnaan program; 3) Indikator yang bersifat kolaboratif belum memiliki pola penanganan bersama yang jelas, pertukaran data antarinstansi belum optimal; 4) Sebagian pengelola pendidikan belum memiliki kapasitas yang memadai dalam menganalisis data, mengidentifikasi akar masalah, dan merancang intervensi berbasis bukti.

Dengan demikian, hasil USG menegaskan bahwa belum optimalnya Pemanfaatan data Rapor Pendidikan merupakan masalah utama yang menjadi akar dari berbagai permasalahan turunan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya nilai rapor pendidikan, yang pada akhirnya menimbulkan dampak lebih besar pada mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh. Hubungan antara masalah utama dengan penyebab masalah level satu dan dua ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pohon Permasalahan Kebijakan Implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) Kota Sungai Penuh

Sumber: Hasil Analisis

Masalah utama tersebut dipengaruhi oleh beberapa akar masalah pada level 1. Pertama, PBD belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran. Permasalahan ini dipicu oleh akar masalah level 2, yaitu Hasil Rapor belum menjadi dasar prioritas, belum masuk secara konsisten ke dokumen perencanaan, dan belum menjadi dasar pengalokasian anggaran. Kedua, Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah, seperti lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kemenag menyebabkan nilai literasi SD Keagamaan rendah. Ketiga, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut belum kuat. Keempat, Kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data masih terbatas. Secara keseluruhan, menunjukkan keterkaitan yang sistematis antara akar masalah level 2, akar masalah level 1, hingga masalah utama dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya Pemanfaatan data Rapor Pendidikan secara optimal, berbagai permasalahan teknis dan kelembagaan akan terus berlanjut dan berdampak pada mutu pendidikan daerah.

Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan instrumen yang menyediakan informasi mengenai kondisi, capaian, dan mutu layanan pendidikan berdasarkan berbagai indikator yang relevan. Rapor Pendidikan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah serta menentukan langkah perbaikan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, Rapor Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melihat capaian indikator pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen diagnosis dan dasar pengambilan keputusan berbasis data. Informasi yang terdapat dalam Rapor Pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan capaian, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis faktor penyebab, serta merumuskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan. Rapor Pendidikan memberikan informasi pada berbagai dimensi tersebut sehingga pemerintah daerah dapat melihat bahwa rendahnya capaian suatu indikator tidak selalu disebabkan oleh satu faktor. Oleh karena itu, pembenahan mutu membutuhkan analisis terhadap akar masalah.

Rapor Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan konsep Perencanaan Berbasis Data (PBD). PBD merupakan pendekatan perencanaan yang menggunakan data dan informasi yang valid sebagai dasar dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, merumuskan intervensi, serta mengalokasikan sumber daya. Secara konseptual, pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam PBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Data Rapor Pendidikan → Identifikasi Masalah → Analisis Akar Masalah → Penetapan Prioritas → Perumusan Intervensi → Perencanaan dan Penganggaran → Pelaksanaan → Monitoring dan Evaluasi → Perbaikan

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa Rapor Pendidikan merupakan sumber informasi penting untuk mengidentifikasi masalah mutu layanan pendidikan daerah. Misalnya, apabila suatu indikator secara konsisten berada pada kategori rendah, kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menemukan akar masalah, kewenangan yang terkait, serta bentuk intervensi yang diperlukan. Dengan demikian, pembenahan Rapor Pendidikan bukan berarti sekadar meningkatkan nilai indikator, tetapi membangun siklus pengelolaan pendidikan berbasis data mulai dari identifikasi masalah sampai evaluasi hasil intervensi.

Mutu Layanan Pendidikan

Mutu layanan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena menentukan sejauh mana sistem pendidikan mampu memberikan layanan yang efektif, relevan, inklusif, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hasil belajar peserta didik, tetapi juga oleh kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, lingkungan belajar, tata kelola, serta kemampuan satuan pendidikan dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. UNESCO mendefinisikan kualitas pendidikan sebagai tingkat efektivitas dan nilai pengalaman pendidikan yang diterima peserta didik. Kualitas tersebut mencakup antara lain relevansi kurikulum, metode pembelajaran, praktik asesmen, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan peserta didik. (UNESCO et al., 2025).

Mutu layanan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. UNESCO IIEP mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan, yaitu efektivitas pengelolaan sekolah dan waktu belajar, keberadaan guru yang berkualifikasi dan mampu mengajar secara efektif, ketersediaan serta pemanfaatan infrastruktur dan sumber belajar, serta lingkungan yang inklusif dan aman bagi perkembangan peserta didik (IIEP., 2025). Mutu layanan pendidikan memiliki hubungan erat dengan ketersediaan dan pemanfaatan data. Data pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi aktual, mengidentifikasi kesenjangan, menentukan masalah prioritas, merancang intervensi, serta mengevaluasi keberhasilan program. UNESCO menegaskan bahwa data dan bukti merupakan komponen penting dalam pemantauan kualitas pembelajaran dan pemanfaatan informasi untuk memperbaiki mutu pendidikan (UNESCO et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut relevan dengan Perencanaan Berbasis Data (PBD). PBD menempatkan data sebagai dasar dalam mengidentifikasi masalah, menentukan akar masalah, menetapkan prioritas, menyusun program dan kegiatan, serta melakukan evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakukan. Dengan demikian, PBD dapat dipandang sebagai instrumen tata kelola untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, karena keputusan pembangunan pendidikan didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau kebiasaan perencanaan sebelumnya.

Rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk melihat kondisi mutu pendidikan secara lebih komprehensif. Data dalam Rapor Pendidikan dapat membantu pemerintah daerah dan satuan pendidikan mengenali indikator yang masih rendah, melihat perubahan capaian dari waktu ke waktu, serta menentukan area yang membutuhkan intervensi. Hubungan antara mutu layanan pendidikan, Rapor Pendidikan dan PBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Rapor Pendidikan → Identifikasi Masalah → Analisis Akar Masalah → PBD → Intervensi →
Monitoring dan Evaluasi → Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.

Dalam kerangka ini, Rapor Pendidikan bukan sekadar instrumen untuk memberikan gambaran mengenai capaian pendidikan, tetapi dapat menjadi basis evidence-based policy bagi pemerintah daerah. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan UNESCO bahwa evaluasi sistem pendidikan perlu berbasis bukti dan digunakan untuk mengidentifikasi hambatan sistemik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menyusun langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan (UNESCO et al., 2025).

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, konsep mutu layanan pendidikan menjadi penting karena terdapat beberapa indikator prioritas dalam Rapor Pendidikan yang masih berada pada kategori rendah, antara lain persentase PAUD terakreditasi minimal B, angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun pada jalur kesetaraan, serta literasi dan numerasi murid SD Kemenag. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan hasil belajar, tetapi juga mencakup akses, kualitas satuan pendidikan, tata kelola, dan koordinasi lintas kewenangan. Karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh perlu diarahkan pada penguatan siklus perencanaan yang berbasis data. Setiap indikator yang masih rendah perlu dianalisis sampai pada akar masalahnya, kemudian diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memiliki target, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas.

Perencanaan Berbasis Data

Perencanaan Berbasis Data (PBD) merupakan pendekatan dalam penyusunan perencanaan yang menggunakan data dan informasi sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas, merumuskan intervensi, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks pendidikan, PBD diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran didasarkan pada kondisi nyata serta kebutuhan yang teridentifikasi melalui data.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa PBD merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai dasar intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan dengan tujuan mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Dengan demikian, PBD tidak sekadar berarti menggunakan data dalam proses perencanaan, tetapi merupakan perubahan pendekatan dari perencanaan yang bersifat rutin dan berbasis asumsi menuju perencanaan yang didasarkan pada bukti, kebutuhan, prioritas masalah, dan kapasitas intervensi. PBD bertujuan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang paling membutuhkan intervensi. Dalam konteks pendidikan, PBD juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.

Dalam sistem pendidikan Indonesia, Rapor Pendidikan merupakan salah satu sumber utama data untuk mendukung PBD. Rapor Pendidikan menampilkan hasil evaluasi sistem pendidikan dan dapat digunakan oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi internal serta dasar penyusunan perencanaan berbasis data. Rapor Pendidikan tidak hanya menampilkan capaian indikator pendidikan, tetapi juga membantu mengidentifikasi indikator yang bermasalah, menganalisis akar masalah, dan memberikan rekomendasi pembenahan. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan selanjutnya perlu menetapkan masalah yang menjadi prioritas sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Rapor Pendidikan dapat ditempatkan sebagai evidence base dalam proses perencanaan pendidikan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pendidikan sehingga perencanaan tidak hanya didasarkan pada persepsi atau kebiasaan, tetapi pada bukti mengenai capaian dan permasalahan yang terjadi.

Dalam konteks pemerintah daerah, PBD menjadi penting karena persoalan pendidikan sering kali melibatkan lebih dari satu faktor dan lebih dari satu aktor. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, satuan pendidikan, kementerian/lembaga terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini sangat relevan ketika indikator pendidikan memiliki kewenangan kota/kabupaten maupun kewenangan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu membedakan masalah yang dapat diselesaikan secara langsung dengan masalah yang membutuhkan kerja sama dengan pihak lain. PBD memiliki hubungan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan karena proses perencanaan dimulai dari pemetaan kondisi pendidikan dan identifikasi masalah. Data Rapor Pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui indikator yang mengalami capaian rendah, kemudian dianalisis untuk menentukan akar masalah dan bentuk intervensi yang diperlukan.

Dalam konteks Kota Sungai Penuh, pendekatan PBD menjadi semakin penting karena berdasarkan data Rapor Pendidikan yang menjadi dasar policy paper ini terdapat beberapa indikator prioritas yang masih berada pada kategori rendah, yaitu persentase PAUD terakreditasi minimal B, angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun pada jalur kesetaraan, serta literasi dan numerasi murid SD Kemenag. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan perencanaan yang lebih terarah. Pemerintah daerah perlu menggunakan data untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: apa masalahnya, seberapa besar masalahnya, apa akar penyebabnya, siapa yang memiliki kewenangan untuk menanganinya, intervensi apa yang paling tepat, berapa sumber daya yang dibutuhkan, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Dengan PBD, indikator yang rendah tidak berhenti sebagai informasi dalam Rapor Pendidikan, tetapi menjadi dasar untuk menyusun intervensi yang konkret dan terukur.

Kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki keterkaitan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022; dan 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023.

Pilihan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab II, permasalahan utama dalam pemanfaatan data rapor pendidikan belum optimal di Kota Sungai Penuh terletak pada PBD belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, Koordinasi lintas sektor dan kewenangan masih lemah dan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut

belum kuat Untuk mengatasi permasalahan utama, makalah ini mengusulkan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut: 1) Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran. Alternatif ini berfokus mengintegrasikan hasil Rapor Pendidikan dan PBD ke dalam dokumen perencanaan, program/kegiatan, indikator kinerja, serta penganggaran daerah; 2) Perkuat Koordinasi lintas sektor dan kewenangan, Alternatif ini berfokus pada membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, Kemenag, dan pemangku kepentingan lainnya; dan 3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan. Alternatif ini berfokus pada monitoring secara berkala, mengevaluasi capaian, menyusun laporan tindak lanjut, dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan berikutnya. Perumusan alternatif kebijakan dalam policy paper ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi (Wolf & Floyd, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pembenahan rapor pendidikan, sehingga strategi yang dihasilkan lebih adaptif, realistis, dan implementatif.

Analisis SWOT

Alternatif Kebijakan 1: Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Tabel 7. Analisis SWOT Alternatif Kebijakan 1

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
PBD memberikan dasar yang lebih objektif Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Rapor Pendidikan sebagai sumber data	Kemampuan SDM belum merata Belum terdapat mekanisme rekomendasi PBD Koordinasi belum optimal.
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Kebijakan pemerintah pusat Rapor Pendidikan menjadi sumber informasi Tersedianya platform digital	Perubahan prioritas pembangunan Keterbatasan fiskal daerah Perbedaan kualitas data memengaruhi perencanaan

Sumber: Hasil Analisis

Analisis SWOT terhadap alternatif kebijakan Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa alternatif ini memiliki posisi strategis dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Sungai Penuh. Dari aspek kekuatan (strength), PBD memberikan dasar yang lebih objektif dalam menentukan program, kegiatan, dan alokasi anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan Tersedianya Rapor Pendidikan sebagai sumber data untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Namun demikian, dari sisi kelemahan (weakness), penintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran menghadapi tantangan pada Kemampuan SDM dalam menganalisis dan menerjemahkan data menjadi kebijakan/program belum merata, Belum terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan rekomendasi PBD masuk ke dokumen perencanaan dan penganggaran, dan Perbedaan kualitas, kelengkapan, dan keterbaruan data dapat memengaruhi ketepatan perencanaan.

Dari aspek peluang (opportunities), alternatif kebijakan ini mendukung sinergi agenda nasional Kebijakan pemerintah pusat semakin mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis data. Rapor Pendidikan dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan daerah, serta tersedianya sistem informasi dan platform digital yang dapat mendukung pengelolaan data pendidikan. Di sisi lain, terdapat beberapa ancaman (threats) yang perlu diantisipasi dalam implementasi kebijakan ini, diantaranya Perubahan prioritas pembangunan dan kebijakan dapat mengurangi konsistensi penerapan PBD, Keterbatasan fiskal daerah dapat menyebabkan rekomendasi berbasis data tidak seluruhnya dapat dibiayai, dan Perbedaan kualitas, kelengkapan, dan keterbaruan data dapat memengaruhi ketepatan perencanaan.

Alternatif Kebijakan 2: Perkuat Koordinasi lintas sektor dan kewenangan.

Tabel 8. Analisis SWOT Alternatif Kebijakan 2

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Adanya forum koordinasi Rapor Pendidikan menjadi dasar bersama Adanya komitmen bersama	Pembagian peran dan tanggung jawab belum jelas 2. Data dan informasi belum terintegrasi 3. Forum koordinasi cenderung bersifat sektoral
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai <i>common data</i> . Kerja sama dapat diperkuat Pemanfaatan teknologi informasi	Perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal Ego sektoral Perbedaan prioritas intervensi

Sumber: Hasil Analisis

Analisis SWOT terhadap alternatif kebijakan Perkuat Koordinasi lintas sektor dan kewenangan memiliki kekuatan (Strength) diantaranya; adanya forum koordinasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, Kemenag, dan pemangku kepentingan lainnya. Data Rapor Pendidikan dapat menjadi dasar bersama dalam mengidentifikasi permasalahan dan menentukan prioritas intervensi. Adanya komitmen peningkatan mutu layanan pendidikan melalui PBD. Namun, kebijakan Perkuat Koordinasi lintas sektor dan kewenangan memiliki kelemahan seperti Pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi dalam menindaklanjuti Rapor Pendidikan belum jelas, data dan informasi pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai dasar koordinasi, serta Forum koordinasi cenderung bersifat sektoral dan belum berorientasi pada penyelesaian masalah secara bersama.

Kebijakan ini juga memiliki peluang (opportunities), diantaranya Rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai *common data* dalam menetapkan prioritas lintas sektor, Kerja sama dengan Kemenag, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dapat diperkuat, dan Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pertukaran dan pemantauan data secara lebih cepat.

Sementara itu, kebijakan ini juga memiliki ancaman (threats) seperti Perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dapat menyebabkan keterlambatan tindak lanjut, Ego sektoral dan kepentingan program masing-masing perangkat daerah dapat menghambat kolaborasi, dan Ketidaksamaan pemahaman terhadap data dan indikator pendidikan dapat menimbulkan perbedaan prioritas intervensi.

Alternatif Kebijakan 3: Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan.

Tabel 9. Analisis SWOT Alternatif Kebijakan 3

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Pemerintah memiliki mekanisme monitoring Menjadi dasar perbaikan program dan kegiatan. Menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan pendidikan	Belum dilakukan secara konsisten dan berkala Dokumentasi belum terintegrasi secara optimal Tindak lanjut hasil evaluasi belum selalu menjadi dasar perubahan atau penyempurnaan program
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Pemanfaatan teknologi informasi. Rapor Pendidikan sebagai instrumen capaian indikator Memperkuat proses evaluasi.	Keterbatasan anggaran. Data yang tidak konsisten Rendahnya komitmen

Sumber: Hasil Analisis

Analisis SWOT terhadap alternatif kebijakan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan memiliki kekuatan (strength), diantaranya; Pemerintah daerah memiliki perangkat dan mekanisme monitoring program Pembangunan, Hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi dapat menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan pendidikan.

Disamping itu, monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan memiliki kelemahan (weakness) seperti; Monitoring tindak lanjut hasil Rapor Pendidikan belum dilakukan secara konsisten dan berkala, dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi belum terintegrasi secara optimal, dan tindak lanjut hasil evaluasi belum selalu menjadi dasar perubahan atau penyempurnaan program.

Kebijakan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan memiliki peluang (opportunities), diantaranya; Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung monitoring berbasis data secara berkala, rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai instrumen untuk melihat perubahan capaian indikator dari waktu ke waktu, dan koordinasi lintas perangkat daerah dan satuan pendidikan dapat memperkuat proses evaluasi.

Namun, kebijakan ini juga memiliki ancaman (threats), seperti; Keterbatasan anggaran dan SDM dapat menyebabkan monitoring tidak dilakukan secara optimal, data yang terlambat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat menghambat evaluasi, dan Rendahnya komitmen sebagian pelaksana terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dapat mengurangi efektivitas perbaikan.

Analisis Kelayakan Alternatif Kebijakan

Ketiga alternatif kebijakan perlu dilakukan analisis kelayakan sesuai dengan konteks kebijakan implementasi PBD di Kota Sungai Penuh. Makalah ini menggunakan teknik yang direkomendasikan oleh (Dunn, 2016) meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing alternatif kebijakan mampu menjawab permasalahan Implementasi pembenahan rapor pendidikan di Kota Sungai Penuh secara komprehensif. Aspek Analisis Kelayakan Kebijakan ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Aspek Analisis Kelayakan Kebijakan

Kriteria	Esensi
Efektivitas	Merujuk pada sejauh mana alternatif kebijakan yang direkomendasikan mampu menghasilkan dampak atau keluaran yang optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efisiensi	Menunjukkan kemampuan alternatif kebijakan dalam menghasilkan manfaat yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, sehingga rasio antara hasil yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan berada pada tingkat yang paling menguntungkan.
Kecukupan (adequacy)	Mengukur sejauh mana alternatif kebijakan yang diusulkan mampu menjawab dan memenuhi tingkat kebutuhan atau permasalahan yang menjadi fokus utama.
Kesamaan (equity)	Berkaitan dengan kemampuan alternatif kebijakan dalam menciptakan distribusi manfaat yang adil dan proporsional bagi seluruh kelompok masyarakat yang terdampak.
Responsivitas (responsiveness)	Menggambarkan tingkat kepekaan alternatif kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan, preferensi, serta nilai-nilai yang berkembang di dalam kelompok masyarakat tertentu.
Kelayakan (appropriateness)	Menunjukkan tingkat kesesuaian alternatif kebijakan sebagai pilihan yang tepat, baik dari segi substansi, kondisi yang dihadapi, maupun kemungkinan implementasinya di lapangan.

Sumber: Dunn (2016)

Untuk menjamin objektivitas, keempat narasumber dalam identifikasi permasalahan diundang kembali untuk mengikuti wawancara semi-terstruktur. Teknik wawancara dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sama, tetapi dengan instrumen yang berbeda dengan untuk diberikan penilaian 1 – 10 beserta diskusi untuk mendalami kelayakan setiap alternatif kebijakan. Hasil analisis kelayakan untuk setiap alternatif kebijakan dengan keenam aspek yang dinilai direkapitulasi pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Analisis Kelayakan Kebijakan Setiap Alternatif

Alternatif Kebijakan	Narasumber	Efektiv	Efisien	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Ketepatan	Rata-Rata
Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran	Narasum 1	9	9	9	9	8	10	9,0
	Narasum 2	10	9	9	8	9	10	9,2
	Narasum 3	10	9	8	9	9	9	9,0
	Narasum 4	9	9	8	9	9	9	8,8
Rata-rata	–	9,5	9	8,5	8,8	8,8	9,5	9,0
Perkuat Koordinasi lintas sektor dan kewenangan	Narasum 1	7	8	7	8	7	8	7,5
	Narasum 2	8	7	8	7	7	7	7,3
	Narasum 3	8	8	7	8	7	7	7,5
	Narasum 4	7	7	7	7	7	7	7,0
Rata-rata	–	7,5	7,5	7,3	7,5	7	7,3	7,3
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan	Narasum 1	8	7	7	7	8	8	7,5
	Narasum 2	7	7	6	7	7	8	7,0
	Narasum 3	8	7	6	7	7	7	7,0
	Narasum 4	7	7	7	6	7	8	7,0
Rata-rata	–	7,5	7	6,5	6,8	7,3	7,8	7,1

Sumber: Hasil Analisis

Skala 1–10: 1 = sangat rendah / tidak layak, 10 = sangat tinggi / sangat layak Rata-rata dihitung untuk tiap kriteria dan tiap alternatif kebijakan. Narasumber 1–4: 1)Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Sungai Penuh; 2)Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal pada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh; 3)Kasi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Sungai Penuh; serta 4)Kepala Sekolah SD Negeri Kota Sungai Penuh. Hasil rekapitulasi nilai dari keempat narasumber menunjukkan perbedaan prioritas dan persepsi terhadap kelayakan masing-masing alternatif.

Alternatif 1: Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran

Berdasarkan hasil penilaian, alternatif kebijakan Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai rata-rata 9,0/10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa alternatif kebijakan ini sangat layak dan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi untuk dipertimbangkan sebagai kebijakan pembenahan rapor pendidikan Kota Sungai Penuh.

Aspek yang menjadi kekuatan utama adalah efektivitas dan ketepatan (9,5), Nilai tinggi menunjukkan bahwa integrasi PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran dipandang mampu menghubungkan hasil identifikasi masalah pendidikan dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Nilai ketepatan yang tinggi juga

menunjukkan strategi ini sangat relevan dengan kebutuhan untuk memastikan data pendidikan benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan daerah. Dengan demikian, Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran dapat direkomendasikan sebagai alternatif yang Sangat Layak, integrasi PBD menjadi mekanisme untuk memastikan data Rapor Pendidikan masuk ke dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Alternatif 2: Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kewenangan

Nilai rata-rata 7,3/10 menunjukkan bahwa Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kewenangan merupakan alternatif kebijakan yang cukup layak dilaksanakan, tetapi belum menjadi alternatif yang paling kuat apabila dibandingkan dengan Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran yang sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 9,0/10 artinya, Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kewenangan lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen operasional yang mendukung Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran, bukan sebagai satu-satunya instrumen kebijakan.

Hasil penilaian terhadap alternatif kebijakan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kewenangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 7,3 dari skala 10. Nilai tertinggi terdapat pada kriteria efektivitas, efisiensi, dan pemerataan sebesar 7,5, hal ini menunjukkan bahwa narasumber menilai Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kewenangan merupakan instrumen yang cukup tepat untuk memperkuat pembenahan rapor pendidikan. Koordinasi dapat memperkuat penyelesaian masalah yang membutuhkan keterlibatan beberapa sektor, mencegah tumpang tindih program, tetapi membutuhkan waktu dan mekanisme koordinasi, dan dapat memperluas jangkauan intervensi lintas sektor dan kewenangan.

Alternatif 3: Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan

Berdasarkan hasil penilaian empat narasumber, alternatif kebijakan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan memperoleh nilai rata-rata sebesar 7,1 dari skala 10. Nilai tertinggi terdapat pada kriteria ketepatan sebesar 7,8, hal ini menunjukkan sangat relevan untuk memastikan tindak lanjut PBD benar-benar dilaksanakan. Diikuti dengan nilai efektivitas 7,5, artinya membantu memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Alternatif ini memiliki posisi penting sebagai mekanisme pengendalian, yaitu memastikan kebijakan dan program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan dan diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Dari data ini menunjukkan bahwa Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan merupakan kebijakan yang cukup layak.

Dari hasil analisis Dunn yang bersumber dari wawancara empat narasumber, dapat disimpulkan bahwa Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan alternatif kebijakan paling layak dan strategis untuk dijadikan prioritas. Sementara itu, Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Kewenangan dan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan dapat dijalankan sebagai kebijakan pelengkap yang saling mendukung, guna meningkatkan efektivitas implemtasi PBD dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Kota Sungai Penuh.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis akar penyebab, dan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode William N. Dunn melalui kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, maka *policy paper* ini merekomendasikan satu kebijakan yaitu Pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran. Rekomendasi ini dipilih karena memiliki keunggulan, diantaranya: 1) Memiliki efektivitas tinggi dengan skor 9,5, integrasi PBD dinilai mampu menghubungkan permasalahan yang teridentifikasi melalui Rapor Pendidikan dengan intervensi pemerintah daerah; 2) Memiliki ketepatan tinggi skor 9,5 menunjukkan bahwa kebijakan ini relevan dengan kebutuhan untuk memperbaiki proses perencanaan yang belum sepenuhnya menggunakan data sebagai dasar pengambilan Keputusan; 3) Memperkuat keterkaitan antara data, program, dan anggaran rapor Pendidikan tidak hanya digunakan untuk mengetahui kondisi pendidikan, tetapi menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan anggaran; 4) Meningkatkan ketepatan sasaran penggunaan anggaran dapat diarahkan pada indikator dan permasalahan pendidikan yang menjadi prioritas berdasarkan data; dan 5) Mendorong keberlanjutan perbaikan mutu pendidikan Hasil pelaksanaan dan evaluasi dapat digunakan sebagai masukan untuk siklus perencanaan berikutnya. Pengintegrasian PBD diharapkan mampu memastikan bahwa hasil Rapor Pendidikan digunakan secara sistematis dalam mengidentifikasi permasalahan, menetapkan prioritas, menyusun program dan kegiatan, serta menentukan alokasi anggaran. Implementasi kebijakan perlu didukung oleh mekanisme koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas pelaksana, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan.

Langkah Implementasi Kebijakan

Untuk melaksanakan kebijakan "Pengintegrasian Perencanaan Berbasis Data (PBD) ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah" secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menyusun

tahapan dan langkah strategis yang terstruktur. Proses pengintegrasian PBD ke dalam dokumen perencanaan daerah (seperti RKPD, Renja Dinas, serta APBD) mengacu pada siklus Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB):

Tabel 12. Langkah / Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahapan	Kegiatan Utama	Aktor/ Penanggung Jawab	Output
Tahap I Identifikasi	Mengunduh dan menganalisis rapor capaian daerah (Rapor Pendidikan/Indikator Kinerja Utama). Menemukan indikator prioritas (SPM) dengan capaian terendah (kuning/merah).	Dinas Pendidikan, Bappeda	Daftar indikator prioritas daerah yang wajib ditingkatkan (Analisis Kesenjangan).
Tahap II Refleksi	Melakukan evaluasi internal untuk mencari akar masalah utama yang menyebabkan capaian indikator rendah. Memetakan kendala dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola, atau anggaran	Dinas Pendidikan, Bappeda	Laporan akar masalah yang spesifik pada indikator dengan capaian terendah
Tahap III Benahi (Perencanaan)	Memilih program dan kegiatan intervensi yang paling relevan untuk mengatasi akar masalah tersebut Menerjemahkan solusi menjadi nomenklatur program/kegiatan resmi sesuai Permendagri.	Bappeda, Dinas Pendidikan	Program/kegiatan perbaikan telah masuk ke dalam dokumen perencanaan (RKPD & Renja).
Tahap IV Benahi (Panganggaran)	Memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk mendanai program intervensi tersebut Mengunci alokasi anggaran dan menjadikannya prioritas pendanaan di tahun berjalan.	Dinas Pendidikan, BKAD, Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Alokasi anggaran (Rupiah) resmi tersedia dan ditetapkan dalam APBD (DPA-SKPD) untuk intervensi akar masalah.

Tahap I: Identifikasi

Tahap Identifikasi merupakan langkah paling awal dan krusial dalam metode Perencanaan Berbasis Data (PBD). Pada tahap ini, Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan berfokus untuk menemukan masalah utama yang terjadi di lapangan secara obyektif berdasarkan data riil, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau perkiraan. Tujuan Utama Tahap Identifikasi Memetakan kondisi nyata capaian kinerja layanan (seperti kualitas pendidikan atau capaian Standar Pelayanan Minimal/SPM). Menentukan indikator-indikator prioritas yang membutuhkan perhatian paling mendesak untuk dibenahi.

Langkah-Langkah Pelaksanaan 1) Mengakses & Mengunduh Data Capaian mengambil data resmi dari platform yang tersedia, seperti Rapor Pendidikan (untuk bidang pendidikan) atau laporan indikator SPM daerah; 2) Menganalisis Indikator Kinerja memeriksa seluruh indikator capaian dan melihat kategorisasinya berdasarkan warna atau batas penilaian: Merah (Capaian Kurang): Membutuhkan penanganan paling prioritas. Kuning (Capaian Sedang): Perlu ditingkatkan dan diwaspadai. Hijau (Capaian Baik): Perlu dipertahankan atau ditingkatkan; dan 3. Menetapkannya sebagai Indikator Prioritas Masalah menyaring dan memilih beberapa indikator yang nilainya paling rendah atau memiliki dampak paling luas terhadap kualitas layanan untuk dijadikan prioritas pembenahan.

Contoh Penerapan dalam Perencanaan Daerah a) Konteks: Dinas Pendidikan Kabupaten A melihat Rapor Pendidikan Daerah; 2) Proses Identifikasi: Dari sekian banyak indikator (seperti Literasi, Numerasi, Karakter, Iklim Keamanan), ditemukan bahwa Kemampuan Numerasi siswa SD bernilai merah (rendah); dan 3) Hasil Identifikasi: Menetapkan "*Rendahnya Kemampuan Numerasi Siswa SD*" sebagai indikator masalah utama yang wajib dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk ditangani pada tahun anggaran mendatang.

Tahap II: Refleksi

Tahap Refleksi merupakan langkah kedua dalam metode Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang dilakukan setelah masalah utama ditemukan pada tahap Identifikasi. On tahap ini, fokus utamanya adalah mencari akar masalah yang menyebabkan rendahnya capaian indikator tersebut. Tujuan dari tahap refleksi adalah mencegah Pemda atau Dinas terkait hanya menyelesaikan "gejala di permukaan", melainkan menemukan penyebab mendasar agar solusi yang disusun nantinya tepat sasaran. Tujuan Utama Tahap Refleksi Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai indikator prioritas. Menghubungkan antara masalah hasil belajar/capaian dengan proses pembelajaran, tata kelola, atau ketersediaan sumber daya. Menyusun peta masalah secara komprehensif sebagai dasar penetapan program pembenahan.

Langkah-Langkah Pelaksanaan 1) Memetakan Indikator Akar Masalah dari Data (Rapor) Membuka kembali data Rapor/Indikator dan melihat dimensi pendukung (misalnya Dimensi D untuk Proses Pembelajaran atau Dimensi E untuk Pengelolaan Sekolah/Daerah). Menganalisis indikator turunan mana yang skornya juga rendah dan berkontribusi langsung terhadap masalah utama; 2) Melakukan Analisis Diskusi (FGD) Lintas Sektor Mengumpulkan pihak-pihak relevan (Bappeda, Tim Penyusun Renja Dinas, Pengawas, Kepala Sekolah, atau Auditor Internal) untuk berdiskusi secara mendalam. Menggunakan pendekatan pertanyaan "*Mengapa ini terjadi?*" secara berulang (*5 Whys Analysis*) hingga menemukan akar penyebab paling dasar; dan 3. Mengkategorikan Akar Masalah Membagi akar masalah ke dalam beberapa aspek operasional, seperti: Kompetensi SDM: Kurangnya kapasitas guru/aparatur dalam metode kerja atau pembelajaran. Proses & Manajerial: Belum adanya standar operasional, kurikulum belum optimal, atau supervisi minim. Sumber Daya & Sarpras: Keterbatasan alat bantu, media pembelajaran, atau fasilitas pendukung.

Contoh Penerapan dalam Perencanaan Daerah Masalah Utama (dari Tahap Identifikasi): Kemampuan Numerasi Siswa SD bernilai rendah (merah). Proses Refleksi (Mencari Akar Masalah): *Pertanyaan 1: Mengapa kemampuan numerasi siswa rendah? Jawaban: Siswa kesulitan memahami konsep dasar matematika dan cenderung bosan saat jam pelajaran; Pertanyaan 2: Mengapa siswa bosan dan kesulitan memahami konsep? Jawaban: Guru masih menggunakan metode ceramah konvensional dan jarang memakai alat peraga atau pendekatan berbasis proyek; Pertanyaan 3: Mengapa guru tidak memakai metode berbasis proyek/alat peraga? Jawaban: Sebagian besar guru belum pernah mendapat pelatihan numerasi modern dan sekolah tidak memiliki anggaran khusus untuk pengadaan alat peraga.* Hasil Refleksi (Akar Masalah yang Ditemukan): 1. Rendahnya kompetensi pedagogis guru dalam pengajaran numerasi kreatif; dan 2. Belum optimalnya alokasi anggaran sekolah untuk penyediaan media dan sarana belajar numerasi.

Tahap III: Benahi (Perencanaan)

Tahap Benahi (Perencanaan) merupakan langkah ketiga dalam metode Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang dilakukan setelah akar masalah berhasil dirumuskan pada tahap Refleksi. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah merumuskan solusi dan menyusun program kerja yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa akar masalah yang telah ditemukan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata yang masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan Utama Tahap Benahi (Perencanaan) Menyelaraskan akar masalah dengan solusi intervensi yang paling tepat dan efektif. Menerjemahkan solusi intervensi ke dalam bahasa, kodefikasi, dan nomenklatur resmi perencanaan daerah. Memastikan program pembenahan terakomodasi dalam dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Merumuskan Solusi Intervensi Menyusun daftar kegiatan spesifik yang secara langsung dapat menyelesaikan akar masalah yang ditemukan pada tahap Refleksi; 2. Memetakan ke Nomenklatur Perencanaan Resmi (SIPD) Menerjemahkan solusi kegiatan tersebut ke dalam urusan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sesuai dengan regulasi Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Daerah (Kepmen/Permendagri terkait SIPD); 3. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan Menentukan indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang terukur untuk setiap kegiatan yang direncanakan; dan 4) Penginputan ke Dokumen Perencanaan Memasukkan usulan program dan sub-kegiatan tersebut ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dan RKPD agar memiliki legitimasi perencanaan.

Contoh Penerapan dalam Perencanaan Daerah Akar Masalah (dari Tahap Refleksi): 1. Rendahnya kompetensi guru dalam pengajaran numerasi berbasis proyek; 2. Belum optimalnya alokasi media dan sarana belajar numerasi di sekolah. Proses Benahi (Perencanaan): Solusi 1: Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan terstruktur. *Pemetaan Nomenklatur (SIPD):* Program Pengelolaan Pendidikan → Kegiatan Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi → Sub-Kegiatan *Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan*; dan Solusi 2: Penyediaan media dan alat peraga numerasi. *Pemetaan Nomenklatur (SIPD):* Program Pengelolaan Pendidikan → Sub-Kegiatan *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*. Hasil Benahi (Perencanaan): Dua sub-kegiatan di atas resmi terdaftar di dalam dokumen Renja Dinas Pendidikan dan RKPD Daerah lengkap dengan target indikator kinerjanya.

Tahap IV: Benahi (Panganggaran)

Tahap Benahi (Panganggaran) merupakan tahap krusial dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang berfungsi merealisasikan rencana intervensi menjadi kebijakan fiskal nyata. Tanpa alokasi anggaran, rencana pembenahan yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan hanya akan menjadi dokumen formalitas. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan dan penguncian alokasi anggaran APBD untuk mendanai sub-kegiatan yang telah dirancang untuk menyelesaikan akar masalah. Tujuan Utama Tahap Benahi (Panganggaran) mengalokasikan dana APBD secara tepat sasaran sesuai prioritas pembenahan berbasis data. Mencegah pemotongan atau pergeseran anggaran (*refocusing*) pada sub-kegiatan prioritas PBD.

Mengintegrasikan rekomendasi kegiatan ke dalam dokumen anggaran resmi daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Penetapan Pagu Indikatif dan Prioritas Anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bappeda dan BPKAD memastikan sub-kegiatan PBD mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Dinas/Perangkat Daerah menyusun rincian kebutuhan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB) untuk setiap sub-kegiatan PBD, seperti honor narasumber pelatihan, konsumsi, pengadaan alat peraga, atau bahan cetak. 3) Verifikasi dan Pembahasan Anggaran Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat melakukan penelaahan RKA untuk memverifikasi bahwa anggaran yang diajukan benar-benar efisien dan linier dengan target indikator kinerja yang ingin diperbaiki; dan 4) Penguncian Anggaran dalam DPA-SKPD Setelah APBD disahkan bersama DPRD, alokasi anggaran PBD ditandatangani dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sebagai dasar legal pengeluaran kas daerah.

Contoh Penerapan dalam Penganggaran Daerah Sub-Kegiatan (dari Tahap Benahi Perencanaan): 1) *Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan* (Pelatihan Numerasi Guru); dan 2) *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* (Alat Peraga Numerasi SD). Proses Benahi (Penganggaran): KUA-PPAS: TAPD menetapkan alokasi pagu prioritas sebesar Rp 750.000.000 untuk Dinas Pendidikan khusus penanganan isu numerasi. RKA-SKPD: Dinas Pendidikan merinci anggaran tersebut: Rp 400.000.000 untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Numerasi bagi 200 guru SD. Rp 350.000.000 untuk pengadaan kit/alat peraga matematika yang didistribusikan ke 50 sekolah berskor merah. DPA-SKPD: Anggaran Rp 750.000.000 resmi terkunci di DPA Dinas Pendidikan dan siap dieksekusi pada tahun berjalan. Hasil Benahi (Penganggaran): Dukungan pendanaan APBD yang mengikat dan siap digunakan secara sah untuk mengeksekusi solusi atas akar masalah yang ditemukan.

Jika diterapkan pada permasalahan capaian Rapor Pendidikan yang masih rendah sebagai latar belakang penyusunan policy paper, proses analisis kebijakan dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Pada tahap identifikasi, dilakukan analisis terhadap data historis selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2024, 2025, dan 2026, untuk mengidentifikasi indikator yang menunjukkan kondisi stagnan pada kategori rendah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat tiga indikator prioritas yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, persentase PAUD terakreditasi minimal B yang merupakan kewenangan pemerintah kota menunjukkan kondisi stagnan rendah selama periode 2024–2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa mutu kelembagaan dan kelayakan layanan PAUD di tingkat kota belum memenuhi standar akreditasi minimal B secara merata. Kedua, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun pada jalur pendidikan kesetaraan, yang juga merupakan kewenangan pemerintah kota, menunjukkan kondisi stagnan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia sekolah yang putus sekolah atau belum memperoleh layanan pendidikan formal maupun nonformal belum sepenuhnya terserap dalam program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C yang diselenggarakan pemerintah kota. Ketiga, indikator literasi dan numerasi murid SD/MI di bawah kewenangan Kementerian Agama juga menunjukkan kondisi stagnan rendah selama tiga tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan dasar membaca dan berhitung peserta didik pada satuan pendidikan madrasah belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahap refleksi, analisis diarahkan untuk menemukan akar masalah yang menyebabkan ketiga indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan. Pada indikator PAUD, akar masalah yang perlu mendapat perhatian antara lain masih terbatasnya pendampingan teknis dan bantuan dalam pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi pengelola PAUD swasta maupun masyarakat. Selain itu, keterbatasan alokasi APBD untuk pemberian hibah atau bantuan sarana dan prasarana serta peningkatan kualifikasi pendidik PAUD turut menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya capaian akreditasi. Pada indikator APS pendidikan kesetaraan, permasalahan utama antara lain belum optimalnya pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara by name by address, sehingga intervensi terhadap anak yang berada di luar sistem pendidikan belum dapat dilakukan secara tepat sasaran. Di sisi lain, dukungan terhadap fasilitas dan kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih terbatas dan belum merata. Sementara itu, pada indikator literasi dan numerasi SD/MI di bawah kewenangan Kementerian Agama, salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan adalah masih digunakannya metode pembelajaran konvensional oleh sebagian guru dan belum optimalnya penerapan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan literasi dan numerasi. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergi pendanaan serta program antara pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama karena adanya perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Tahap selanjutnya adalah tahap benahi, yaitu menerjemahkan hasil identifikasi dan refleksi ke dalam perencanaan program serta penganggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing pengelola. Untuk

indikator PAUD terakreditasi minimal B yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, khususnya Dinas Pendidikan dan Bappeda, diperlukan program pendampingan dan fasilitasi akreditasi bagi PAUD yang menjadi sasaran intervensi. Perencanaan tersebut dapat diarahkan melalui program pembinaan PAUD, antara lain melalui kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pengembangan sarana dan prasarana PAUD sesuai nomenklatur perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Dari sisi penganggaran, pemerintah kota perlu mengarahkan alokasi APBD dalam RKA/DPA Dinas Pendidikan untuk mendukung pendampingan proses akreditasi, pemenuhan standar layanan, serta bantuan operasional atau dukungan pembiayaan bagi satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan APS usia 7–18 tahun pada jalur pendidikan kesetaraan, Pemerintah Kota perlu membangun sistem pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terintegrasi dan berbasis wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Pendataan tersebut menjadi dasar dalam menentukan sasaran intervensi dan memastikan anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat diarahkan kembali ke layanan pendidikan yang sesuai. Dari sisi program, intervensi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C serta penyediaan dukungan biaya pendidikan atau beasiswa bagi peserta didik pendidikan nonformal. Pemerintah kota juga perlu memperkuat kelembagaan dan kapasitas PKBM, termasuk melalui dukungan fasilitas, peningkatan kualitas layanan, serta bantuan perlengkapan belajar bagi peserta didik sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi peserta didik SD/MI yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, intervensi perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. Dari sisi internal Kementerian Agama, program dapat diarahkan pada penyelenggaraan bimbingan teknis metode pembelajaran literasi dan numerasi bagi guru madrasah melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sesuai jenjang dan karakteristik satuan pendidikan. Dari sisi lintas sektor, Pemerintah Kota dan Kementerian Agama dapat membangun mekanisme kerja sama atau kemitraan yang memungkinkan guru madrasah berpartisipasi dalam program pelatihan literasi dan numerasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dari sisi penganggaran, Kementerian Agama dapat mengarahkan anggaran DIPA untuk mendukung peningkatan kompetensi guru madrasah, sedangkan dukungan dari pemerintah daerah dapat diberikan sepanjang sesuai dengan kewenangan, mekanisme, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya melalui bentuk kerja sama atau dukungan program yang diperbolehkan secara regulatif.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap capaian Rapor Pendidikan tidak berhenti pada identifikasi indikator yang masih rendah, tetapi dilanjutkan dengan penelusuran akar masalah dan penerjemahannya ke dalam intervensi yang konkret, terukur, serta sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara hasil Rapor Pendidikan, perencanaan pembangunan daerah, dan penganggaran, sehingga setiap intervensi memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya dari tahun ke tahun.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama implementasi PBD di Kota Sungai Penuh adalah pemanfaatan data Rapor Pendidikan yang belum optimal dengan total skor USG tertinggi (57), diikuti oleh PBD yang belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran (54), koordinasi lintas sektor dan kewenangan yang masih lemah (51), monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang belum kuat (47), serta keterbatasan kapasitas SDM dalam analisis dan pemanfaatan data (43). Analisis kelayakan berdasarkan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa pengintegrasian PBD ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan alternatif kebijakan paling layak (rata-rata 9,0/10), terutama pada kriteria efektivitas dan ketepatan (9,5), dibandingkan penguatan koordinasi lintas sektor dan kewenangan (7,3) serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkelanjutan (7,1). Penelitian ini juga menghasilkan peta jalan (roadmap) implementasi kebijakan melalui siklus Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) yang terdiri atas empat tahap, yaitu identifikasi indikator prioritas, refleksi akar masalah, pembenahan perencanaan melalui pemetaan nomenklatur program/kegiatan ke dalam Renja dan RKPD, serta pembenahan penganggaran melalui penguncian alokasi anggaran dalam DPA-SKPD. Roadmap tersebut membedakan intervensi berdasarkan kewenangan pengelola, yaitu kewenangan Pemerintah Kota untuk indikator PAUD terakreditasi dan APS kesetaraan, serta sinergi dengan Kementerian Agama untuk indikator literasi dan numerasi murid SD Kemenag.

Apabila roadmap tersebut dijalankan secara konsisten, kebijakan ini diproyeksikan mampu: memperbaiki tata kelola pembangunan pendidikan dari pendekatan yang belum sepenuhnya berbasis data menuju perencanaan yang sistematis, terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan; meningkatkan pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan; mengintegrasikan PBD ke dalam perencanaan

dan penganggaran daerah sehingga intervensi pendidikan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif; berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator prioritas Rapor Pendidikan, khususnya persentase PAUD terakreditasi minimal B, Angka Partisipasi Sekolah usia 7–18 tahun pada pendidikan kesetaraan, serta literasi dan numerasi murid SD Kemenag; dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Sungai Penuh. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian, yaitu menentukan prioritas permasalahan implementasi PBD, menilai kelayakan alternatif kebijakan, dan menyusun langkah implementasinya. Dengan demikian, Rapor Pendidikan tidak berhenti sebagai instrumen informasi atau pelaporan, tetapi menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan pendidikan daerah.

Referensi

- Al Haddar, G., Qomariah, A., & Pati, A. B. (2026). Optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. *Borneo Educational Management and Research Journal*, 7(1), 102–112.
- Andini, N. A. P., Mas'udah, H., Rosydina, A., & Nurkolis. (2025). Peluang dan tantangan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 10(1), 100–113. <https://doi.org/10.24256/kelola.v10i1.6094>
- Ansyari, M. F., Groot, W., & De Witte, K. (2020). Tracking the process of data use professional development interventions for instructional improvement: A systematic literature review. *Educational Research Review*, 31, 100362. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100362>
- Astuti, A. W., Azainil, & Warman. (2025). Analisis rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan berbasis data dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Bontang Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*, 6(2), 214–221. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v6i2.23021>
- Astutiningtyas, D. N. L., Astuti, I. P., Wulandari, N., & Nurkolis. (2024). Implementasi perencanaan berbasis data dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN 3 Bebenan Kabupaten Kendal. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 5512–5526.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations (3rd ed.)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15, 35. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Datnow, A., & Hubbard, L. (2016). Teacher capacity for and beliefs about data-driven decision making: A literature review of international research. *Journal of Educational Change*, 17(1), 7–28. <https://doi.org/10.1007/s10833-015-9264-2>
- Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis (5th ed.)*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Handayani, R., Apriani, B. K., & Mustari, M. (2025). Pemanfaatan rapor pendidikan dalam perencanaan berbasis data untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN 44 Ampenan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 336–342. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.2935>
- Hoogland, I., Schildkamp, K., van der Kleij, F., Heitink, M., Kippers, W., Veldkamp, B., & Dijkstra, A. M. (2016). Prerequisites for data-based decision making in the classroom: Research evidence and practical illustrations. *Teaching and Teacher Education*, 60, 377–386. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.012>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Rapor Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kippers, W. B., Poortman, C. L., Schildkamp, K., & Visscher, A. J. (2018). Data literacy: What do educators learn and struggle with during a data use intervention? *Studies in Educational Evaluation*, 56, 21–31.
- Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. *Teaching and Teacher Education*, 60, 366–376. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011>
- Marsh, J. A., & Farrell, C. C. (2015). How leaders can support teachers with data-driven decision making: A framework for understanding capacity building. *Educational Management Administration & Leadership*, 43(2), 269–289. <https://doi.org/10.1177/1741143214552502>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257–273. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>
- Schildkamp, K., Poortman, C., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors promoting and hindering data-based decision making in schools. *School Effectiveness and School Improvement*, 28(2), 242–258. <https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1256901>
- Schildkamp, K., Poortman, C. L., Ebbeler, J., & Pieters, J. M. (2019). How school leaders can build effective data teams: Five building blocks for a new wave of data-informed decision making. *Journal of Educational Change*, 20(3), 283–325. <https://doi.org/10.1007/s10833-019-09345-3>
- Setiyono, J., Munir, Kurniady, D. A., Kurniatun, T. C., & Sumiati. (2026). Strategies to improve minimum service standards (SPM) in education sector based on education report data. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 730–735. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i3.24591>
- Wolf, C., & Floyd, S. W. (2017). Strategic planning research: Toward a theory-driven agenda. *Journal of Management*, 43(6), 1754–1788. <https://doi.org/10.1177/0149206313478185>